

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pejabat tinggi pemerintahan Trump menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Obama mengenai “*strategic patience*” gagal untuk menghentikan program senjata Nuklir Korea Utara, maka dari itu mereka memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut. Namun demikian, kebijakan baru pemerintahan Trump “*strategic accountability*” terlihat serupa dengan kebijakan sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama, sebagaimana diamati di atas, kedua kebijakan tersebut serupa karena mereka berasal dari perpaduan antara realisme dan internasionalisme liberal. Fokus mereka terhadap strategi tekanan untuk memaksakan tekanan dan sanksi diplomatik konsisten dengan saran realis untuk mengambil langkah punitif sebagai bagian dari diplomasi “*carrot-and-stick*” dalam kasus non-kooperatif dan provokasi yang “bandel”. Perhatian mereka terhadap penguatan kerjasama keamanan dengan ROK juga sesuai dengan logika realis yang mendukung kerjasama dengan sekutu AS untuk secara efektif menghadapi negara-negara yang bermusuhan. Pada saat bersamaan, fokus mereka terhadap sanksi ekonomi multilateral terhadap Korea Utara melalui PBB merupakan penerapan saran dari internasionalis liberal.

Terdapat kesamaan antara kedua kebijakan tersebut dalam beberapa komponen khusus. Pertama, kedua kebijakan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap, dapat di buktikan dan tidak dapat diubah. Baru-baru ini, beberapa ahli kebijakan AS mengusulkan opsi kebijakan bahwa AS akan menerima nuklir Korea Utara karena menurut mereka denuklirisasi tidak realistik dilihat dari perkembangan terakhir program nuklir dan rudal mereka. Namun demikian, pejabat tinggi pemerintahan Trump, seperti dalam pemerintahan Obama, telah menolak opsi tersebut

dan menekankan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir.

Kedua, kedua kebijakan tersebut memiliki kesamaan fokus terutama dalam strategi penekanan dan sanksi daripada satu perjanjian dan negosiasi, terutama karena rezim komunis terus mengambil tindakan provokatif untuk melakukan uji coba nuklir dan rudal, dan menolak untuk melakukan negosiasi. Kebijakan “*strategic accountability*” telah mengikuti pola yang sama dengan kebijakan “*strategic patience*” selama periode kedua pemerintahan Obama yaitu menerapkan sanksi bertahap multilateral terhadap Korea Utara melalui PBB. Kedua kebijakan memiliki kesamaan bahwa Washington tidak secara aktif berusaha untuk terlibat dengan Pyongyang tanpa menawarkan syarat yang konkret dan dorongan untuk denuklirisasi karena rezim komunis terus-menerus menolak untuk mengubah kebijakan mengenai senjata nuklirnya dan melakukan negosiasi. Kedua kebijakan ini hanya menetapkan keterlibatan bersyarat bahwa AS akan melakukan negosiasi dengan Korea Utara apabila hal ini dapat memunculkan niat untuk menghentikan program nuklirnya dengan menghentikan uji coba nuklir dan rudal.

Ketiga, kedua kebijakan memiliki kesamaan karena keduanya bertentangan dengan kebijakan perubahan rezim melalui sarana militer yang disukai oleh “*neo-conservatives*”. Para pejabat dan ahli di kedua pemerintahan memahami bahwa hal tersebut tidak layak karena resiko yang dapat terjadi dari opsi militer yang mengarah pada perubahan rezim, seperti pembalasan besar-besaran Korea Utara, kemungkinan memicu perang besar, korban jiwa yang banyak dan reaksi serta kemungkinan intervensi dari China. Karena alasan yang sama, pemerintahan Korea Selatan secara konsisten menentang tindakan militer semacam itu. Keempat, kedua kebijakan ini menegaskan dan menuntut keterlibatan China dalam menekan

Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan kembali melakukan negosiasi denuklirisasi. Terakhir, kebijakan “*strategic accountability*” memiliki kesamaan dengan kebijakan “*strategic patience*” bahwa keduanya memperkuat kemampuan pencegahan dan kesiapan militer bekerjasama dengan Korea Selatan dan Jepang untuk mengatasi ancaman dan provokasi Korea Utara.

Sementara itu, kebijakan “*strategic accountability*” berbeda dengan kebijakan “*strategic patience*” dalam beberapa hal. Pertama, mereka memiliki prioritas yang berbeda dalam menghadapi tantangan nuklir yang dihadapi AS. Pemerintahan Trump memiliki prioritas dalam kebijakan keamanan luar dan dalam negeri terhadap permasalahan program nuklir dan rudal Korea Utara dan berusaha untuk mengatasinya dengan “lebih banyak energi dan urgensi”. Sebaliknya, pemerintahan Obama dilaporkan menempatkan prioritas utama untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran, karena memerlukan usaha dan energi lebih untuk membongkar program nuklir Korea Utara yang sudah cukup maju untuk memproduksi senjata nuklir kecil. Kedua, pemerintahan Trump lebih tegas dibandingkan pemerintahan Obama dalam hal mendorong China untuk sepenuhnya menerapkan sanksi PBB dan melakukan tekanan pada Korea Utara dalam hal yang disebut telah menempuh kebijakan berdasarkan keterlibatan insentif serta sanksi sekunder terhadap Cina. Secara khusus, pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan besar pada China dengan meluncurkan sanksi sekunder yang dibentuk untuk menahan atau memotong perusahaan dan transaksi bank dengan Korea Utara.

Keempat, kebijakan pemerintahan Trump terhadap Korea Utara berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang secara serius mempertimbangkan opsi militer, seperti penempatan bergilir aset strategis AS dekat Semenanjung Korea, pengerahan kembali taktik senjata nuklir AS ke

Semenanjung Korea dan serangan militer terbatas terhadap fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara. Alasan utama dibalik keputusan Pemerintahan Trump dalam mempertimbangkan opsi militer dengan sungguh-sungguh karena rezim komunis diperkirakan mendekati tahap akhir *ICBMs (Intercontinental Ballistic Missiles)* dengan target hulu ledak nuklir adalah dataran AS. Sejak Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ke-6 pada tanggal 3 September, pejabat tinggi Washington telah menegaskan kembali terhadap peringatan AS akan menggunakan opsi militer jika tekanan diplomasi dan sanksi ekonomi gagal menahan uji coba nuklir dan rudal Korea Utara.

Terakhir, kebijakan “tekanan” pemerintahan Trump lebih komprehensif dan intensif dibandingkan pemerintahan Obama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan tersebut memberikan tekanan “maksimal”, menunjukkan bahwa pemerintahan Trump secara lebih aktif memperluas dan meningkatkan sanksi multilateral dan unilateral terhadap rezim Kim Jung-un dengan tujuan eksplisit mengisolasi ekonominya. Secara khusus, pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan melalui serangkaian sanksi ekonomi unilateral dalam waktu kurang dari setahun. Untuk saat ini, bagaimanapun, tidak pasti seberapa efektif kebijakan “tekanan” pemerintahan Trump akan memaksa Korea Utara untuk mengubah perilaku provokatifnya dan kembali melakukan negosiasi karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan pengaruh dari kebijakan tersebut. Walaupun demikian, Korea Utara dipandang tidak sepenuhnya berjanji untuk menghapus senjata nuklirnya. Pada pertemuan yang penulis jabarkan sebelumnya mengenai pertemuan kedua pemimpin ini di Singapura, Trump dan Kim menandatangani Deklarasi Singapura yang sangat optimistis tetapi tidak rinci. Mereka mengatakan mendukung perdamaian dan denuklirisasi, tetapi mereka tidak pernah menyatakan apa arti sebenarnya atau bagaimana akan diwujudkan. Korea Utara telah meledakkan situs percobaan

nuklir - meskipun sebenarnya mereka tidak memerlukannya lagi selama negara itu mengetahui nuklirnya efektif - tetapi tidak terdapat indikasi Pyongyang melakukan hal lainnya untuk menghentikan pengembangan nuklir. Akan tetapi sekali lagi, penerapan strategi yang dilakukan oleh Trump dapat mengubah sikap Kim Jong Un terkait dengan program nuklirnya dan kondisi perdamaian di Semenanjung Korea. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump adalah bagaimana sanksi-sanksi yang masih diterapkan terhadap Korea Utara dapat dipertimbangkan dan dibicarakan kembali. Pasalnya, pada pertemuan berikutnya antara kedua pemimpin ini di Vietnam, tidak ada hasil yang dapat disepakati oleh keduanya disebabkan Amerika Serikat menolak untuk mencabut sanksi-sanksi yang diterapkan kepada mereka. Dalam hal ini, diperlukan adanya tinjauan kembali baik dari Amerika Serikat maupun komunitas internasional. Namun, satu hal yang pasti mengenai adanya perubahan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Donald Trump disebabkan oleh strategi diplomasi yang coba ia terapkan kepada Korea Utara di setiap pertemuannya dengan Kim Jong Un, dimana Trump berusaha menjalin persahabatan dengan Kim untuk memperoleh konsesi. Pada KTT pertama Trump-Kim di Singapura, pemimpin Korea Utara itu membuat komitmen tidak spesifik untuk berusaha mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya. Di Hanoi, kedua pemimpin itu tadinya diperkirakan akan menyepakati langkah-langkah konkrit seperti perlucutan fasilitas nuklir Yongbyon yang memproses bahan bakar plutonium, dan akan memperbaiki hubungan dengan menandatangani deklarasi perdamaian. Perundingan-perundingan menjelang KTT itu pula yang mengindikasikan kesediaan Washington untuk mengompromikan tuntutan lamanya bahwa Pyongyang harus terlebih dahulu melucuti program nuklirnya sebelum diberi konsesi.